
PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEMISKINAN

JOUZAR FAROUQ ISHAK (jouzar.farouq@widyatama.ac.id)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama

ABSTRACT

The research purposed to examine the impact of direct expenditure and indirect expenditure to poverty condition in the regency or city government in West Java Province. Population in this research was the citizen of regency or city government in West Java Province. The data obtained was a combination of time series data and cross-section data or commonly referred to as panel data. The technique applied in obtaining sampling was purposive sampling. The researcher equipped the regression analysis with hierarchal design to determine relation between two variables which in regression equation contains element of interaction between two or more independent variables. The results showed that direct expenditure had negative effect on poverty in district or city government in West Java Province. Yet, indirect expenditure had also positive affect on poverty in the similar area as well.

Keywords : Direct expenditure, indirect expenditure, poverty

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan ditingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Peneliti melengkapi analisis regresi dengan perancangan hirarki untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dalam persamaan regresi mengandung unsur interaksi antara dua atau lebih variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, belanja tidak langsung berdampak positif terhadap kemiskinan di wilayah yang sama pula.

Kata kunci : Belanja langsung, belanja tidak langsung, kemiskinan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan merupakan salah satu akar permasalahan dari masalah rendahnya pembangunan di

Indonesia (Misdawita & Sari, 2013).

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir disemua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah (Hasan & Zikriah, 2006).

Menurut Mankiw, Quah dan Wilson (2012) kemiskinan adalah salah satu masalah yang sangat sulit dihadapi oleh pembuat kebijakan. Keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan

dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Anggota keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan. Walaupun sulit untuk memisahkan penyebab-penyebab kemiskinan dari efek-efek ini, tidak diragukan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai penyakit ekonomi dan sosial.

Kemiskinan dan ketidakadilan masih banyak terjadi di negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Persoalan ini boleh dikatakan belum terpecahkan secara tuntas. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan di Indonesia, kemiskinan dan ketidakadilan (serta pengangguran) merupakan isu-isu sosial ekonomi yang selalu aktual untuk diperbincangkan (Brata, 2003).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada semester 2 (September 2015) sebanyak 2.706.520 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin perkotaan tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.789.570 jiwa dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.571.150 jiwa. Data pada Semester 2 (September 2014) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan di Provinsi Jawa Barat masih yang tertinggi dengan angka 2.554.060 jiwa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 1.771.530 jiwa dan Jawa Timur 1.531.890 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada Semester 2 (September 2013) 4.382.650 jiwa dan mengalami peningkatan sehingga pada semester 2 (September 2015) jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.485.650 jiwa (BPS Jawa Barat, 2017).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik

(Setyowati & Suparwati, 2012).

Provinsi Jawa Barat mempunyai 11 prioritas pembangunan dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Menurut Misdawita dan Sari (2013) bahwa aspek pengeluaran adalah aspek yang krusial bagi pemerintah, sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (*deprivation*), bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.

Amartya Sen dalam Suradi (2007) menyatakan bahwa ada inti yang absolut dari kemiskinan. Wabah kelaparan berkaitan dengan ide tentang kemiskinan absolut, demikian pula ketidakmampuan dalam menghadapi kehinaan sosial, dan ketidakmampuan dalam membesarkan dan mendidik anak. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlakunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*fundamental needs*).

Tingkat kemiskinan adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut. Garis kemiskinan ditentukan oleh pemerintah dan disesuaikan sekitar setiap tahun untuk menjelaskan perubahan pada tingkat harga dan tergantung pada ukuran keluarga (Mankiw *et al.*, 2012).

Menurut Freeman, Shoulders dan Allison (2012) belanja, konsep yang berbeda-beda daripada beban, adalah sebuah ukuran dari dana kewajiban yang dikeluarkan selama periode dari operasional pemerintahan, pengeluaran modal, dan hutang. Belanja pemerintah dapat didefinisikan sebagai akuntansi dana dimana semua penurunan dana aset bersih untuk kegiatan rutin operasional pemerintah, pengeluaran modal, dan hutang kecuali yang terjadi dari transfer ke dana lainnya. Belanja merupa-

kan penurunan aset dana aset bersih yang tidak dihasilkan dari transfer dan pengembalian transaksi. Ukuran dari suatu belanja adalah dana kewajiban yang cepat cair dengan sumber daya saat ini (Granof, 2007).

Menurut Halim (2007) belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Belanja Langsung berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- H2 : Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- H3 : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

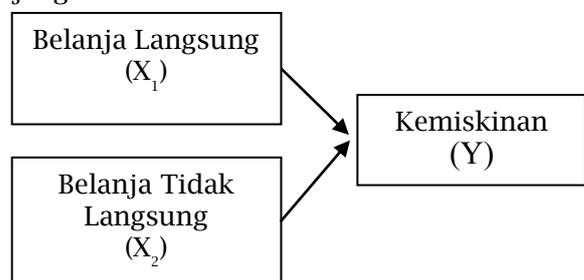
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dikarenakan jumlah penduduk miskin perkotaan di Provinsi Jawa Barat lebih besar daripada Provinsi lainnya di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten dan Kota.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung serta penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi dimana mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2013). Didalam penelitian ini variabel dependen adalah kemiskinan serta variabel independen adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini menggunakan data panel atau sering disebut *pooled data* (*pooling time series* dan *cross-section*). Ghozali dan Ratmono (2013) mendefinisikan data panel sebagai *data set* di mana perilaku unit *cross-sectional* diamati sepanjang waktu.



Gambar 1. Hubungan Struktur X_1 , X_2 terhadap Y

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Besarnya pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai t tabel dilihat pada taraf signifikansi 0,05 dimana $df = \text{jumlah sampel variabel bebas} = 125 - 2 = 123$. Oleh karena itu, nilai t tabel pada $df = 123$ adalah -1,65734. Nilai t hitung diperoleh pada Tabel 1 yaitu -2,066 yang berarti $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ ($-2,066 < -1,65734$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima yang memberikan kesimpulan bahwa variabel Belanja Langsung ber-

Tabel 1

Uji Hipotesis

Per sa ma an	B	Unstd	Std	t	Sig.	
		Coef.	Coef.			
		Std.	Beta			
		Error				
1	(Constant)	66030,9	15998,3	4,127	0,000	
	Belanja Langsung	-5,1E- 008	0,000	-0,202	-2,066	0,040
	Belanja Tidak Langsung	1,63E- 007	0,000	0,639	6,524	0,000

a. Dependent Variable: Penduduk Miskin

pengaruh negatif signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Penelitian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh Misdawita dan Sari (2013) bahwa pengeluaran pemerintah yang salah satunya dibidang pendidikan sudah tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka.

Dalam bentuk belanja langsung pengeluaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Selain itu belanja pemerintah daerah juga diperuntukan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan (Sasana, 2012).

Nilai t tabel dilihat pada taraf signifikansi 0,05 dimana $df = \text{jumlah sampel} - \text{variabel bebas} = 125 - 2 = 123$. Oleh karena itu, nilai t tabel pada $df = 123$ adalah 1,65734. Nilai t hitung diperoleh pada Tabel 1 yaitu 6,524 yang berarti t hitung $>$ t tabel ($6,524 > 1,65734$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima yang memberikan kesimpulan bahwa variabel Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

Menurut Sasana (2012) secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Minggu, Rumatte dan Rotinsulu (2016) bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dengan meningkatnya belanja tidak langsung. Semakin besar belanja tidak langsung diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan tentunya akan mengurangi kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Belanja Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2) Belanja Tidak Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (3) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan anggaran dari belanja langsung sehingga dengan peningkatan anggaran belanja langsung ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

SARAN

Penulis memberikan saran yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sehingga generalisasi hasil penelitian dan pembahasan kurang dapat diberlakukan bagi provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang agar dapat memperluas serta menambah sampel penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2017). Katalog BPS: Perkembangan tingkat kemiskinan Jawa Barat September 2016. Diakses pada <https://jabar.bps.go.id/publication.html>
- Brata, A.G. (2003). *Modal asing, industri dan kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Freeman, R. J., Shoulders, C..D., & Allison, G.S. (2012). *Governmental and non-profit accounting*. Prentice Hall: Pear-

- son.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis multivariat dan ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Granof, M.H. (2007). *Government and non profit accounting*. New York: John Wiley & Sons.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hasan, T.I.B., & Zikriah. (2006). Pengaruh belanja modal pemerintah dan produk domestik regional bruto terhadap penduduk miskin di Aceh. *Riset Ekonomi*, 2, 97-105.
- Mankiw, N.G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar ekonomi mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Minggu, T. D., Rumat, V.A., & Rotinsulu, D.C. (2016). Analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi swasta terhadap kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18 (2).
- Misdawita., & Sari, A.A.P. (2013). Analisis dampak pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 147-161.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1), 1-12.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y.K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DA , DAK, PAD terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Prestasi*, 9 (1), 113-33.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 1-11.